

Analisis Kepemimpinan di Indonesia dalam Kerangka Tanggap-Darurat Covid-19

Dindin Solahudin¹, Dang Eif Saiful Amin², Deden Sumpena³, Fathin Anjani Hilman⁴

¹Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
dindin.solahudin@uinsgd.ac.id

²Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dangesa@uinsgd.ac.id

³Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
dedensumpena67@uinsgd.ac.id

⁴Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fanjanjih@uinsgd.ac.id

Abstrak

Alih-alih kekayaan sumber daya alam dan sumber dana negara, kesiapan kepemimpinan sebuah negara agaknya lebih menjadi peubah yang menentukan tingkat keefektifan menghadapi serangan pandemi Covid-19. Studi ini menyoroti kepemimpinan di Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19 dengan menelaah tingkat kesiapan, ketanggapan, kekompakan, dan koordinasi di intra dan antarunsur kepemimpinan selevel serta sinergitas dan soliditas koordinasi antara level nasional, regional, dan lokal. Riset pustaka ini menemukan sindroma kegagapan *decision-making* para pemimpin di semua tingkat dan kegejatan koordinasi kepemimpinan di semua level, baik intra maupun antarlevel. Sindroma ini pada awalnya disebabkan oleh sikap meremehkan wabah yang kemudian diperburuk oleh ketidaksiap-sanggupan menanggung risiko kebijakan. Soal keefektifan kepemimpinan nasional, regional, lokal, dan nonformal di Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 belum bisa dinilai data-data seputar wabah belum *fixed* dan masih mengalami perkembangan.

Katakunci: kepemimpinan, tanggap-darurat, pandemi covid-19

Abstract

Instead of the richness of natural resources and financial resources of a nation, leadership alacrity of a nation serves more as a variable that determines the effectiveness rate in facing the attack of pandemic Covid-19. This study highlights Indonesian leadership in facing pandemic Covid-19, examining the degree of alacrity, responsiveness, solidity, and coordination between national, regional, and local levels. This library research finds stuttering syndromes in terms of decision-making amongst leaders at all levels and finds coordination deficiency at all levels, both intra and interlevel. This syndrome triggered in the first place by their underestimation over the pandemic Covid-19 and further aggravated by their unpreparedness to bear the risks of their policy. Concerning the effectiveness of national, regional, and local leaderships in Indonesia in coping with pandemic Covid-19 has not yet to be judged since the data pertaining the pandemic Covid-19 are still in progress and remains dynamic.

Keywords: leadership, emergency-response, pandemic covid-19

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 kini telah menerpa hampir seluruh negara secara global. Meski di awal wabah ada sejumlah negara yang terkesan santai menghadapinya, kini setiap negara telah menunjukkan keseriusannya dalam berperang melawan terjangkit Covid-19. Setiap negara mengerahkan segenap daya upaya untuk menangani pandemi ini demi membatasi area sebaran virus dan meminimalisasi jumlah orang terpapar dan korban meninggal.

Menyaksikan negara-negara maju tampak seperti kewalahan menahan laju persebaran wabah dan tampak tidak mampu menekan angka korban tewas, orang segera berkesimpulan bahwa kemajuan, kekayaan, dan kebesaran sebuah negara tidak menjamin keberhasilan meredam serangan Covid-19. Alih-alih kekayaan sumber daya alam dan sumber dana negara, kesigapan kepemimpinan sebuah negara agaknya lebih menjadi peubah yang menentukan tingkat keefektifan menghadapi serangan pandemi Covid-19.

Kecepatan dan ketepatan penanganan wabah covid-19 sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan (*decision making*). Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan amat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kerapihan koordinasi pada setiap intra dan antarlevel kepemimpinan. Semakin sigap, tanggap, solid, dan efektif kepemimpinan negara, semakin efektiflah ia menangani dan mengatasi pandemi Covid-19.

Berangkat dari asumsi dasar tersebut, artikel ini mencoba melakukan penelaahan kepemimpinan di Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19. Kajian ini menelaah sistem kerja kepemimpinan struktural-hirarkis dari level nasional hingga lokal dan juga organisasi kemasyarakatan. Pada setiap levelnya, analisis difokuskan pada tingkat kesigapan, ketanggapan, kekompakan, dan koordinasi di intra dan antarunsur kepemimpinan selevel. Analisis kemudian diarahkan pada tingkat sinergitas dan soliditas koordinasi antara level nasional, regional, dan lokal.

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah penelusuran pustaka (*library research*). Menurut Darmalaksana (2020) penelitian penelusuran pustaka dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan pada tulisan/artikel yang terdapat di media *online* yang berkaitan dengan peristiwa Pandemi Covid-19. Penggunaan metode ini karena saat ini terdapat banyak tulisan di media *online* terkait situasi dan tindakan pemimpin di Indonesia dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang dikaitkan dengan umumnya teori, karakteristik dan prinsip kepemimpinan, khususnya teori dan prinsip kepemimpinan yang diusung oleh Stephen Covey (1989; 2005).

1 Kepemimpinan Presiden Menghadapi Covid-19

Penyebaran Covid-19 di Indonesia sejak diumumkan pasien positif pada awal Maret 2020 terjadi sangat cepat. Hal ini menyebabkan beberapa daerah di Indonesia menjadi zona merah Covid-19, seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung. Kepemimpinan dibutuhkan sebagai alat guna menetapkan dan memutuskan hakikat tujuan yang ingin dicapai (Fachrurroji, 2008; Suherman, 2019), dalam hal ini tentu saja tujuannya adalah menanggulangi penyebaran virus Corona. Selain itu, Peran pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 tentu menjadi sorotan publik. Langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah pusat adalah menunjuk juru bicara penanganan Covid-19 yaitu Achmad Yurianto sebagai Sekretaris Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dan membentuk gugus tugas untuk mengatasi virus ini yang dipimpin oleh Kepala BNPB, Letjen. Doni Monardo.

Peran pemerintah dalam penanganan Covid-19 setidaknya mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua instrumen tersebut tentu saja belum lengkap, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 2019 *Corona Virus Disease* dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Produk hukum tersebut selaras dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Presiden dalam menghadapi Covid-19, di antaranya terkait dengan kebijakan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan dalam bidang ekonomi menjadi langkah utama yang ditetapkan oleh Presiden. Kebijakan tersebut meliputi penganggaran dan pembiayaan yang memungkinkan terjadinya defisit anggaran

hingga 5.07% (Aria, 2020). Selain itu pemerintah juga melakukan realokasi anggaran dengan merevisi APBN 2020 menjadi Rp. 405,1 Triliun yang akan digunakan untuk belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan, stimulus Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PERPU 01/2020). Adapun dalam hal perpajakan, pemerintah membebaskan PPN impor bahan baku dan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp. 200 juta. Selanjutnya, BI, LPS dan OJK juga memiliki kewenangan baru dalam rangka mengoptimalkan gabungan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi nasional (Aria, 2020).

Keterbatasan alat kesehatan menjadi salah satu alasan bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan. Beberapa kebijakan dalam bidang kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah di antaranya adalah: 1) Mengimpor alat kesehatan dari Tiongkok, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), masker bedah dan masker N95, alat *rapid test* serta ventilator; 2) Merubah fungsi Wisma Atlet menjadi RS Darurat Corona yang dapat menampung tiga ribu pasien bergejala ringan; 3) Menyiapkan fasilitas isolasi pasien di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu dan Pulau Galang, Batam; 4) Meningkatkan kualitas 132 rumah sakit (RS) rujukan bagi penanganan pasien Covid-19; dan 5) Memberikan insentif kepada tenaga kesehatan di wilayah darurat Corona termasuk memberikan santunan kematian kepada tenaga kesehatan (Lidwina, 2020; Lidyana 2020).

Kebijakan dalam bidang pendidikan dituangkan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang meliputi enam poin sebagai berikut: 1) Tidak diselenggarakannya Ujian Nasional Tahun 2020; 2) Proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan / jarak jauh dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup; 3) Ujian sekolah dilaksanakan dengan ketentuan yang tercantum di surat edaran; 4) Kenaikan kelas juga dilaksanakan dengan ketentuan yang tercantum di surat edaran; 5) Dinas Pendidikan dan sekolah diwajibkan untuk menyiapkan regulasi Penerimaan Siswa Baru sesuai protokol kesehatan; dan 6) Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat digunakan untuk pengadaan kebutuhan sekolah dalam pencegahan Covid-19 (SE Mendikbud 4/2020).

Selain mengeluarkan kebijakan dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan 2019 *Corona Virus Disease* yang diterbitkan guna menanggulangi penyebaran Covid-19. Pembatasan ini meliputi diliburkannya sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Pembatasan ini juga berlaku di bidang transportasi terutama dalam menghadapi masa mudik Idul Fitri 1441H. Pembatasan ini semakin jelas dengan adanya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang membahas pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri. Permenhub tersebut juga memberlakukan larangan mudik dengan tujuan keluar atau masuk wilayah yang sudah menerapkan PSBB, zona merah penyebaran Covid-19 dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB (Permana, 2020).

Peran pemerintah sangat penting dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten wajib berkoordinasi dan melaksanakan pengawasan dan komunikasi yang efektif. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentu akan dikoordinasikan pula kepada pemerintah daerah. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan secara struktural dan sistematis, di mana pemerintah daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kota dan kabupaten yang kemudian pihak tersebut berkoordinasi dengan pihak kecamatan hingga RW dan RT setempat sehingga terpantau pergerakan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Langkah yang diambil dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi beserta pimpinan pemerintahan selaras dengan fungsi kepemimpinan yang diusung oleh Stephen Covey (Covey, 2005) yaitu fungsi *modelling* (panutan) dimana beliau memberikan contoh pengambilan tindakan untuk pimpinan daerah hingga masyarakat. Selain itu fungsi *pathfinding* (perintis) juga muncul dengan ditetapkannya beberapa kebijakan terutama di bidang ekonomi. Kemudian fungsi *aligning* (penyelaras) terbukti dengan berjalannya koordinasi yang baik antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah.

2 Kepemimpinan Gubernur Menghadapi Covid-19

Kepemimpinan Gubernur dalam menghadapi Covid-19 tentu merujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, melakukan pendekatan proaktif namun tetap sejalan dengan protokol pemerintah pusat dalam memerangi Covid-19 (Kamil dalam Kholisdinuka, 2020). Hal ini sepadan dengan konsep yang diusung Stephen Covey mengenai prinsip pemimpin yaitu bersikap proaktif dan memiliki inisiatif yang tinggi (Covey, 1989). Sebagai langkah awal, pemerintahan provinsi Jawa Barat membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR) yang sesuai namanya berfungsi sebagai pusat informasi Covid-19 untuk masyarakat Jawa Barat. PIKOBAR tersebut dapat diakses secara daring melalui laman <http://pikobar.jabarprov.go.id> juga melalui Aplikasi di *smart phone*.

Berbagai kebijakan ditetapkan selaras dengan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Beberapa langkah preventif dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti pembagian masker gratis untuk warga yang sakit atau bergejala sakit via Puskesmas, membagikan 1000 paket APD ke seluruh Rumah Sakit di Jawa Barat untuk tenaga medis yang menghadapi Covid-19, melaksanakan tes masal Covid-19 dengan dua opsi (*door to door* dan *drive-thru*), serta mengirimkan alat *rapid test* ke kota dan kabupaten di Jawa Barat. Selain itu provinsi Jawa Barat juga merekrut relawan medis dan non-medis untuk bersama-sama menanggulangi wabah Corona yang menunjukkan bahwa fungsi *empowering* (Covey, 2005) berjalan dengan baik.

Selain itu, provinsi Jawa Barat juga mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji untuk Gubernur/ Wakil Gubernur dan para ASN di Pemprov Jawa Barat selama empat bulan sebagai langkah untuk mengurangi beban masyarakat dan percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19. Hingga 14 April 2020 telah terkumpul dana Rp 4 miliar di rekening Jabar Peduli yang kemudian akan digunakan untuk penanggulangan Covid-19 (Achmad dalam Maulana, 2020). Pemerintah provinsi Jawa Barat juga menyiapkan anggaran yang akan digunakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19 berupa bantuan ekonomi sebesar Rp. 350 ribu dalam bentuk sembako dan Rp. 150 ribu dalam bentuk tunai. Hal ini tentu saja disambut positif oleh masyarakat Jawa Barat (Kurniawan, 2020). Dalam hal ini, kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat menunjukkan prinsip kepemimpinan yang mengutamakan kebaikan bersama (Covey, 1989).

Prinsip kepemimpinan ini juga ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam menanggulangi Covid-19. Sebagai Provinsi yang paling tinggi terpapar virus Covid-19, Anies menetapkan beberapa kebijakan penting di awal pekan masuknya virus Corona ke Indonesia. Penutupan tempat-tempat wisata dan museum, instruksi bekerja dari rumah, pembatasan jam operasional alat transportasi publik hingga instruksi pemberhentian Bus Antar Kota Antar Provinsi (Sari, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki prinsip proaktif dan prinsip prioritas kerja (Covey, 1989).

Anies mengatakan “Pemprov DKI Jakarta turut mengawasi dinamika yang berkembang dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari Spanyol, Amerika Serikat (AS), hingga Korea Selatan.” Salah satunya adalah memperhatikan kebijakan yang diterapkan negara-negara tersebut. Sehingga dapat mengadaptasi dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi Pandemi ini (Sebayang, 2020). Sikap ini membuktikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan visioner (Robbins, 1996) dan bertanggungjawab (Maak dan Pless, 2006).

Karakteristik kepemimpinan yang visioner dan bertanggungjawab juga ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Pemerintah provinsi Jawa Timur mencadangkan *blue print* mitigasi dalam rangkaantisipasi puncak penyebaran Covid-19. Pemprov Jatim mempersiapkan 75 rumah sakit dari 44 rumah sakit rujukan yang sudah ada saat ini (Meilisa, 2020). Dengan bertambahnya rumah sakit rujukan, bertambah pula jumlah pasien yang dapat ditampung untuk proses penyembuhan dari virus Corona.

Fungsi pemberdaya berhubungan dengan upaya pemimpin untuk menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi mampu melakukan yang terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat (Covey, 2005). Fungsi ini jelas nampak pada *blue print* mitigasi antisipasi puncak penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. Khofifah mengatakan Pemprov Jatim juga menyiapkan ribuan tenaga medis yang didalamnya termasuk relawan mahasiswa tenaga kesehatan. Selain itu, Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan berbagai organisasi profesi seperti IDI, PDGI, PPNI dan organisasi Kesehatan lainnya untuk bersama-sama bergotong royong melawan pandemi Covid-19 (Meilisa, 2020).

Fungsi ini juga muncul dari aksi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah yang dengan aktif berkeliling ke berbagai pelosok di Jateng untuk mensosialisasikan virus Corona serta membagikan masker dan sembako untuk masyarakat. Hal ini juga menggerakkan masyarakat Jateng untuk bergerak dan ikut aktif membangun posko dan balai karantina sebagai tempat isolasi untuk para pendatang yang tentu juga menunjukkan bahwa Gubernur Jateng memiliki fungsi *modelling* (Covey, 2005) bagi masyarakatnya serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik (McClelland, 1988; Spencer dan Spencer, 1993).

Gubernur Provinsi Jawa Tengah dinilai paling cepat merespon pandemi virus Corona. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center, 73% responden menilai Ganjar Pranowo cepat dalam memutuskan langkah penanggulangan Covid-19. (Sofuroh, 2020). Beragam kebijakan ditetapkan sesuai dengan arahan pemerintah pusat, seperti meliburkan seluruh Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan melaksanakan *physical distancing*. Kelangkaan APD melahirkan inisiatif Gubernur dan Pemprov Jateng dengan membuat *coverall* atau APD sendiri yang menunjukkan prinsip kepemimpinan yang memiliki inisiatif yang tinggi (Covey, 1989).

Berbanding terbalik dengan Gubernur Jateng, Gubernur Banten dianggap lambat dalam menanggulangi Covid-19. Hasil survey Saiful Mujani Research Center menunjukkan 50% responden menganggap pergerakan Provinsi Banten kurang cepat (Sofuroh, 2020). Sejalan dengan hasil survey tersebut, Wali Kota Serang, Syafrudin, yang merupakan bagian dari Provinsi Banten mengungkapkan bahwa dalam menanggulangi Covid-19 koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Pemprov sangat buruk. Selanjutnya, Syafrudin mengungkapkan bahwa sejak munculnya virus Corona, Pemprov Banten tidak pernah berkomunikasi perihal kebijakan dan instruksi yang akan ditetapkan, sehingga Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak selaras dalam melawan pandemi ini (Syahdana, 2020). Sikap Gubernur dan Pemprov Banten menunjukkan tidak adanya keterampilan interpersonal. Padahal, sosok pemimpin harus memiliki keterampilan interpersonal yang ditunjukkan dengan memahami orang lain, menyampaikan pesan, juga mengayomi (McClelland, 1988; Spencer dan Spencer, 1993). Selain itu, sikap di atas menunjukkan bahwa peran komunikasi dalam organisasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

3 Kepemimpinan Kepala Daerah Kab/Kota Menghadapi Covid-19

Pasien positif Corona pertama merupakan warga kota Depok. Tidak heran apabila publik menyoroti langkah-langkah dan kebijakan yang diambil Wali Kotanya. Beberapa kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok selia dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti larangan untuk berkumpul di tempat umum, menunda kegiatan kunjungan kerja, serta menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (Mantalean, 2020). Berlangsungnya himbauan Wali Kota Depok menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota, yang juga berarti fungsi *aligning* dalam kepemimpinan berlangsung dengan baik.

Begitu pula yang terjadi dengan kepemimpinan Wali Kota Bandung. Selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Presiden dan Gubernur, kepemimpinan Wali Kota juga merujuk pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Diawali dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 443/SE.030-Dinkes tertanggal 14 Maret 2020 mengenai penyebaran wabah virus Corona. Surat Edaran ini meliputi 14 kebijakan sebagai langkah pencegahan Covid-19, di antaranya menutup sementara area publik pemerintah Kota Bandung.

Pemkot Bandung segera menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 13 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* atas pertimbangan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota Bandung. Perwal tersebut memuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Bandung termasuk bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), larangan terhadap kerumunan warga, dan penegakan hukum bagi warga yang melanggar larangan yang tercantum pada Perwal (Kurnia, 2020). Diterbitkannya Perwal ini menunjukkan karakteristik pemimpin yang memiliki inisiatif (Covey, 1989). Kemudian, kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan pemerintah kota Bandung baru-baru ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pemberlakuan PSBB ini merujuk pada Pergub Nomor 30 Tahun 2020 mengenai Pedoman PSBB di Bandung Raya. Pergub ini berisi 27 pasal yang membahas pelaksanaan PSBB hingga pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB (Ramdhani, 2020). Pelaksanaan PSBB di Kota Bandung tidak hanya membuktikan fungsi *aligning* antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung tetapi juga mengindikasikan bahwa Pemkot memiliki prinsip membangun sinergi yang tinggi (Covey, 1989).

Prinsip membangun sinergi juga ditunjukkan pemerintahan Kabupaten Bogor. Bersinergi dengan pemerintahan kota Bogor, Bekasi dan Depok untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai kota penyangga Jakarta dalam memutus rantai penyebaran virus Corona (Flora, 2020). Bupati Bogor, Ade Yasin, juga menghimbau masyarakat untuk mencontoh kepatuhan warga Vietnam dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang dapat membuat masyarakat terpapar virus Corona dan juga membiasakan diri untuk menggunakan masker apabila harus keluar rumah serta mencuci tangan sebelum menyentuh bagian wajah (Khatimah, 2020). Himbauan di atas menyuratkan fungsi *pathfinding* dalam kepemimpinan.

Fungsi *pathfinding* mengungkapkan bagaimana upaya sang pemimpin memahami dan bagaimana kebutuhan utama para *stakeholdernya*, misi dan nilai-nilai yang dianutnya (Covey, 2005). Fungsi ini juga ditemukan dalam kepemimpinan pemerintah Kota Tegal. Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengambil langkah yang cepat setelah mengetahui warganya terpapar virus Corona. Langkah yang diambil Wali Kota Tegal adalah melakukan *local lockdown* dengan cara menutup akses keluar masuk kota selama empat bulan ke depan (Budi, 2020). Kebijakan ini ditetapkan jauh-jauh hari sebelum pemerintah pusat memutuskan melaksanakan PSBB. Ini merupakan inisiatif Wali Kota dan Pemkot Tegal untuk melawan virus Corona. Kebijakan ini membuktikan bahwa Pemkot Tegal memiliki prinsip kepemimpinan yang proaktif dan inisiatif (Covey, 2005).

Bentuk lain dari prinsip kepemimpinan yang proaktif dan inisiatif juga ditunjukkan oleh Wali Kota Semarang. Pemberian keringanan penundaan setoran pajak untuk hotel, restoran, dan tempat hiburan, serta diskon PBB bagi masyarakat. Selain itu, pembayaran pajak dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi Gopay, Tokopedia, Indomaret dan jaringan perbankan (Rismoko, 2020a). Selanjutnya, bagi masyarakat yang masuk ke Ibukota Provinsi Jawa Tengah diwajibkan melapor sebagai upaya penekanan potensi penyebaran Virus Covid-19. Cara pelaporan yang dilakukan sangat mudah, cukup dengan melakukan *scan barcode* yang sudah disediakan di beberapa tempat (Rismoko, 2020b). Aksi ini juga mengindikasikan prinsip kepemimpinan berpikir untuk kebaikan bersama dan selalu melakukan perbaikan secara terus menerus (Covey, 2005).

4 Kepemimpinan Ormas Menghadapi Covid-19

Tidak hanya di tingkat pemerintahan, organisasi kemasyarakatan juga turut menghimbau supaya masyarakat tetap waspada dalam menghadapi Covid-19. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia juga ikut andil dalam memutus rantai virus Corona ini. Selaras dengan pemerintah pusat, PBNU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3945/C.1.34/03/2020 yang menjelaskan berbagai kebijakan terkait Covid-19, seperti mematuhi instruksi dan himbauan Pemerintah RI untuk tidak keluar rumah, tidak mengadakan kegiatan yang mengundang berkumpulnya masyarakat, dan meliburkan beberapa kegiatan keagamaan seperti tahlil (Sigit, 2020). Memasuki bulan Ramadhan, PBNU kembali mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1441 H. Pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan seperti shalat Tarawih dan shalat Idul Fitri

agar dilaksanakan di rumah masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Setiawan, 2020).

Organisasi masyarakat Islam lainnya, Muhammadiyah juga turut andil dalam memutus rantai virus Corona. Melalui maklumat yang diterbitkan 16 Maret 2020, pimpinan Muhammadiyah menghimbau masyarakat untuk melakukan pencegahan dan tindakan secara sungguh-sungguh, masif, dan terkoordinasi dengan baik dalam menghalau penyebaran Covid-19 termasuk aturan salat dan pengajian (Santoso, 2020). Himbauan seperti ini juga dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam, Persatuan Islam, di antaranya berbunyi bahwa masyarakat harus terus meningkatkan kesadaran dan kepedulian dengan mengikuti panduan dan protokoler tindakan preventif dalam melakukan berbagai aktifitas untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona salah satunya dengan cara mengikuti penyelenggaraan ibadah dalam situasi corona yang tercantum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (Nursalikah, 2020).

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh organisasi masyarakat Islam di atas mengindikasikan fungsi *modelling* dalam kepemimpinan yang menjadi panutan untuk jama'ahnya dalam memerangi virus Corona, juga mengindikasikan fungsi *aligning* yakni bersinergi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta fungsi *pathfinding* dengan menghimbau jama'ahnya untuk senantiasa waspada dalam menghadapi pandemi Corona.

Diskusi: Menyoal Kesiapan para Pemimpin

Terdapat banyak narasi dan tindakan pemimpin di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Pada awalnya muncul pro dan kontra mengenai kecemasan dan tingkat bahaya virus Corona. Menteri Kesehatan Terawan pada awalnya terkesan menganggap “enteng dan santuy” terhadap serangan Corona. Saat itu (Januari-Februari 2020) belum teridentifikasi penduduk Indonesia terpapar Covid-19. Narasi-narasi “orang Indonesia kuat,” “jamu membuat orang Indonesia kebal,” dan lain-lain, dikesani mengentengkan serangan Covid-19. Presiden Jokowi juga dianggap lambat mengambil tindakan membentengi Indonesia dari Covid-19 dengan tidak segera menutup wilayah dengan membiarkan transportasi tetap terbuka dengan dunia internasional. Bahkan ia sempat mengajak tim *selebgram* untuk mempromosikan pariwisata Indonesia agar mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Belakangan Menteri Kesehatan Terawan dan Presiden Jokowi mengklarifikasi ucapan dan tindakan mereka sebagai upaya agar rakyat Indonesia tidak *stress* menghadapi situasi Covid-19 yang mungkin masuk ke Indonesia. Bahkan banyak pemimpin di Indonesia yang mengklaim bahwa pemerintah telah jauh-jauh hari menyiapkan diri menghadapi situasi ini. Salah satu bukti adalah dengan menjemput mahasiswa Indonesia yang sedang melaksanakan studi di China dan mengkarantinanya di pulau Galang selama empat belas hari.

Kesan yang muncul di masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lambat dalam bertindak melindungi rakyat Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan Vietnam dan Selandia Baru yang lebih sigap. Memang di sini ada tarik menarik kebijakan antara prioritas menjaga Kesehatan atau menjaga kelangsungan ekonomi negara. Dalam pandangan ilmu kepemimpinan, pemerintah kurang visioner (Bennis dalam Antonio, 2007).

Ketika Awal Maret 2020 teridentifikasi warga Depok yang terpapar Covid-19, mulailah pemimpin Indonesia lebih sigap menghadapi virus—sejalan dengan WHO yang menetapkan bahwa peristiwa ini merupakan pandemi. Sejumlah rumah sakit disiapkan, sejumlah dana dialokasikan, sistem bekerja dan belajar dirubah menjadi bekerja dan belajar dari rumah, beribadah di rumah dan hal-hal lain terkait.

Dalam artikel-artikel yang muncul, tidak hanya Presiden dan pejabat daerah (pemimpin formal) juga pemimpin non-formal (ulama—MUI, ormas-ormas Islam dan lainnya) terlibat aktif berkontribusi dalam usaha pencegahan penyebaran/memutus siklus Covid-19 dan menghadapi situasi dampak sampingan pandemi terutama kelangsungan hidup rakyat Indonesia.

Simpulan

Sebagaimana kalangan pimpinan sejumlah negara maju semacam Italia, kalangan elit pimpinan nasional, regional, lokal, dan nonformal di Indonesia mengalami sindroma kekagetan dan keabaian di fase awal serangan Covid-19. Sampai ketika WHO mengumumkan wabah Covid-19 sebagai semua pandemi, para pimpinan Indonesia di semua level masih merasa aman dari paparan Covid-19. Barulah ketika teridentifikasi kasus nomor satu di Depok pada awal Maret 2020, kalangan pimpinan bangsa ini menunjukkan gejala keseriusan menghadapi wabah ini. Tapi, sampai pertengahan Maret pimpinan nasional masih belum berani mengambil tindakan darurat semacam *lockdown*—hal yang dengan sangat cepat dilakukan kalangan pimpinan Wuhan sejak awal wabah—atau karantina sesuai undang-undang, kendati Gubernur DKI menghendaknya. Tak pelak, pimpinan nasional dianggap tidak sigap dan cepat-tanggap, meski mereka telah mengemukakan sejumlah pertimbangan sebagai dasar kebijakannya.

Saat ini Indonesia masih berada di tengah perjalanan wabah dan masih jauh dari titik akhir. Maka, tidak bijak kita menilai keefektifan kepemimpinan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 karena data-datanya masih dinamis dan terus berkembang. Apakah kepemimpinan nasional, regional, lokal, dan nonformal di Indonesia efektif atau tidak dalam menangani wabah Covid-19 itu baru bisa dinilai kelak saat wabah sudah usai. Sebab, hanya saat itulah kita bisa mengukur keefektifan kepemimpinan melalui data-data wabah yang sudah *fixed* tidak mengalami perkembangan lagi. Untuk analisis kepemimpinan saat ini, tulisan ini baru menemukan kegagalan *decision-making* kepemimpinan dan kegejatan koordinasi kepemimpinan di semua level baik intra maupun antarlevel. ***

Referensi

- Antonio, M. S. (2007). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: PLM.
- Aria, P. (2020). *5 Poin Penting dalam Perpu Kebijakan Ekonomi Terkait Covid-19*. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/04/02/5-poin-penting-dalam-perpu-kebijakan-ekonomi-terkait-covid-19>
- Budi, C. S. (2020). *Cegah Corona, Pemkot Tegal Terapkan "Local Lockdown", Ini Fakta Lengkapnya*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/07010011/cegah-corona-pemkot-tegal-terapkan-local-lockdown-ini-fakta-lengkapnya>.
- Covey, S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People*. New York: Free Press.
- Covey, S. R. (2005). *The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness*. New York: Free Press.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fachrurroji, M. (2008). Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah. *Jurnal Ilmu Dakwah* 4(12), 289-304.
- Flora, M. (2020). *Perangi Pandemi Corona, Tengok Kesiapan Kota Bogor Jelang PSBB Diberlakukan*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4226998/perangi-pandemi-corona-tengok-kesiapan-kota-bogor-jelang-psbb-diberlakukan#>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019.

- Khatimah, H. (2020). *Perangi Covid-19, Bupati Bogor: Harus Belajar dari Kepatuhan Warga Vietnam!*. Diakses dari <https://m.ayobogor.com/read/2020/04/26/6804/perangi-covid-19-bupati-bogor-harus-belajar-dari-kepatuhan-warga-vietnam>
- Kholisdinuka, A. (2020). *Jabar Tegaskan Kebijakan Penanganan Covid-19 Sejalan dengan Pusat*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4966614/jabar-tegaskan-kebijakan-penanganan-covid-19-sejalan-dengan-pusat>
- Kurnia, K. (2020). *Pemkot Bandung Resmi Menetapkan Perwal Penanganan Covid-19*. Diakses dari <https://www.galamedianews.com/bandung-raya/254490/pemkot-bandung-resmi-menetapkan-perwal-penanganan-covid-19.html>
- Kurniawan, I. (2020). *Ini Penjelasan Terkait Bantuan Rp. 500 Ribu Bagi Warga Jabar*. Diakses dari <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13360308/ini-penjelasan-terkait-bantuan-rp-500-ribu-bagi-warga-jabar>
- Lidwina, A. (2020). *Ragam Langkah Jokowi Meredam COVID-19*. Diakses dari <https://katadata.co.id/infografik/2020/03/25/ragam-langkah-jokowi-meredam-covid-19>
- Lidyana, V. (2020). *Jokowi Guyur Rp 75 T Dana Kesehatan Hadapi Corona, Ini Daftarnya*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4960936/jokowi-guyur-rp-75-t-dana-kesehatan-hadapi-corona-ini-daftarnya>
- Maak, T., & Pless, N. M. (2006). Responsible leadership in a stakeholder society—A relational perspective. *Journal of Business Ethics*, 66, 99–115.
- Mantelan, V. (2020). *10 Instruksi Wali Kota Depok Cegah Penyebaran Covid-19, Liburkan Sekolah Hingga Tutup Alun-alun*. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/14/19290881/10-instruksi-wali-kota-depok-cegah-penyebaran-covid-19-liburkan-sekolah?page=2>
- Maulana, Y. (2020). *Cegah Corona, Pemprov Jabar Kumpulkan Rp 4 M dari Potong Gaji ASN*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4977125/cegah-corona-pemprov-jabar-kumpulkan-rp-4-m-dari-potong-gaji-asn>
- McClelland, D. C. (1988). *Human Motivation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meilisa, H. (2020). *Antisipasi Puncak Penyebaran Corona, Pemprov Jatim Siapkan Skema Mitigasi*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4965048/antisipasi-puncak-penyebaran-corona-pemprov-jatim-siapkan-skema-mitigasi>
- Nursalikah, A. (2020). *Persis: Fatwa Corona MUI untuk Kemaslahatan Umat*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q7d7n9366/persis-fatwa-corona-mui-untuk-kemaslahatan-umat>
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 2019 *Corona Virus Disease*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- Permana, R. H. (2020). *Larangan Mudik 2020 Berlaku untuk Daerah PSBB, Ini Daftarnya*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4989468/larangan-mudik-2020-berlaku-untuk-daerah-psbb-ini-daftarnya>
- Ramdhani, D. (2020). *Rangkuman Pergub PSBB di Bandung Raya*. Diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2020/04/21/11240071/rangkuman-pergub-psbb-di-bandung-raya?page=all>

- Rismoko, A. (2020a). *Pandemi Covid-19, Wali Kota Semarang Diskon PBB Hingga Penundaan Pajak Hotel*. Diakses dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/16/55389/pandemi-covid-19-wali-kota-semarang-diskon-pbb-hingga-penundaan-pajak-hotel>
- Rismoko, A. (2020b). *Tekan Penyebaran Covid-19, Masuk Semarang Wajib Scan Barcode*. Diakses dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/15/55326/tekan-penyebaran-covid-19-masuk-semarang-wajib-scan-barcode>
- Robbins, S. (1996). *Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Santoso, B. (2020). *Maklumat Muhammadiyah Terkait Corona, Atur Salat dan Pengajian Saat Wabah*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/03/16/074612/maklumat-muhammadiyah-terkait-corona-atur-salat-dan-pengajian-saat-wabah>
- Sari, N. (2020). *Berbagai Kebijakan Pemprov DKI Hadapi Covid-19 Dalam Sepekan Terakhir*. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/20/11082501/berbagai-kebijakan-pemprov-dki-hadapi-covid-19-dalam-sepekan-terakhir?page=3>.
- SE Mendikbud. (2020). *SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020*. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>
- Sebayang, R. (2020). *Anies Ungkap Rahasia di Balik Gercep DKI Tangani Covid-19*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200428160215-4-155007/anies-ungkap-rahasia-di-balik-gercep-dki-tangani-covid-19>
- Setiawan, K. (2020). *PBNU Keluarkan Edaran terkait Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H*. Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/118644/pbnu-keluarkan-edaran-terkait-ibadah-ramadhan-dan-idul-fitri-1441-h>
- Sigit, S. (2020). *PBNU Keluarkan Instruksi Terkait Pandemi Corona*. Diakses dari <https://www.mitratoday.com/pbnu-keluarkan-instruksi-terkait-pendemi-corona/>
- Sofuroh, F. U. (2020). *Publik Nilai Jateng Paling Responsif Tangani Covid-19*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4981993/publik-nilai-jateng-paling-responsif-tangani-covid-19>
- Spencer, L. M., Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Suherman, U. D. (2019). Pentingnya Kepemimpinan dalam Organisasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1(2), 259-274.
- Syahdana, D. J. (2020). *Wali Kota Serang Ungkap Buruknya Koordinasi Pemprov Banten, Pemerhati Kebijakan Sebut Pemkot/Pemkab Dikesankan Tak Bekerja*. Diakses dari <https://bantenhits.com/2020/04/13/wali-kota-serang-ungkap-buruknya-koordinasi-pemprov-banten-pemerhati-kebijakan-sebut-pemkot-pemkab-dikesankan-tak-bisa-kerja/>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Biografi Penulis

	<p>Dindin Solahudin lahir di Bandung tanggal 5 Agustus 1966 dan merupakan dosen pengampu matakuliah Ilmu Dakwah, Sosiologi Dakwah, Filsafat Sosial, dan Teori Perubahan Sosial di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>
	<p>Dang Eif Saiful Amin lahir di Bandung tanggal 4 April 1969 dan merupakan dosen pengampu matakuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Kepemimpinan Islam di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>
	<p>Deden Sumpena lahir di Garut 1967 dan merupakan dosen pengampu matakuliah Dasar-dasar PMI, Manajemen PMI, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>
	<p>Fathin Anjani Hilman, lahir di Bandung 23 November 1991, merupakan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>